

ABSTRAK

Darwin Awat

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

Skripsi yang berjudul **"Membela Petani Kecil: Pelaksanaan *Land Reform* Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1960-1966)"** ini beranjak dari 3 permasalahan. Pertama, proses terbentuknya UUPA dan *Land Reform*. Kedua, pelaksanaan *Land Reform* pada tahun 1960-1966. Ketiga, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *Land Reform*. Untuk membahas masalah itu maka skripsi ini akan mendekatinya dengan teori fungsional struktural.

Penulisan Sejarah Agraria, terutama yang berkaitan dengan tanah, merupakan masalah yang selalu menarik dan kontekstual untuk diangkat. Dalam kehidupan masyarakat agraris, tanah adalah sumber daya yang sangat vital. Di Indonesia $\pm 70\%$ penduduknya adalah petani dan sebagian besar diantaranya adalah petani tak berlahan. Di sisi lain ada polarisasi penguasaan tanah di tangan sebagian kecil golongan. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan atas penguasaan tanah. Atas dasar itulah maka Pemerintahan Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960 yang salah satu di dalamnya mengamanatkan adanya redistribusi tanah bagi petani yang tak memiliki tanah.

Penulisan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang kebijakan dan pelaksanaan *Land Reform* pada masa pemerintahan Soekarno. Tulisan ini memuat pembahasan serta analisa mengenai latar belakang, pelaksanaan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat gagalnya *Land Reform* pada masa itu. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis. Penulisan ini didasarkan pada sumber berupa buku-buku dan artikel di internet.

Secara garis besar, tulisan ini ingin membuka ingatan masa lalu kita bahwa pernah ada sebuah produk hukum agraria yang berusaha untuk meminimalisir ketimpangan atas struktur penguasaan tanah. Pelaksanaan *Land Reform* pada tahun 1960-1966 mengalami berbagai hambatan akibat sengketa antara para petani yang pro dan para tuan tanah yang kontra. Sengketa-sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bertikai melahirkan konflik. Terlepas dari adanya pro-kontra yang berimplikasi pada gagalnya pelaksanaan *Land Reform*, pelajaran yang bisa diambil adalah gagasan untuk menata ulang struktur penguasaan tanah. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak lagi terjadi polarisasi penguasaan tanah yang cenderung mengakibatkan konflik agraria.

Kata kunci : Sejarah Agraria, Land Reform

ABSTRACT

Darwin Awat

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

Thesis entitled “**Defending the Peasant: The Implementation of Land Reform during Soekarno’s Government Era (1960-1966)**” begins from three kinds of problem. First, the process of composing UUPA and Land Reform. Second, the implementation of Land Reform during 1960-1966. Third, the factors which became obstacles in Land Reform’s implementation. To discuss those problems, therefore, this thesis will approach it using functional-structural theory.

The Agrarian Historiography, particularly which related to land, always being an interesting and contextual problem to be discussed. In Agrarian society’s daily life, land becomes an vital source, especially for the peasant. On average, 70% of Indonesian society are peasants and dominated by landless peasant. On the other side, there was a polarization of land authority which committed by few of people. This condition, evoked discrepancy in land authority. Based on the problem, the government of Soekarno issued UUPA no. 5, 1960 which one of the contents was to instruct the land redistribution for the landless.

This study intends to give comprehension about policy and implementation of Land Reform at Soekarno’s government era. It consists of discussion and analysis about the background, execution and factors which became the obstacles in Land Reform at that time. The method used in this study is analytical-descriptive method. This study based on sources in form of books and article cited from internet which used to describe and analyze the topic.

In general, this study aims to reveal the memory of the past that once there was a product of Agrarian law to minimize discrepancy of land authority. The implementation of Land Reform during 1960s-1966s undergo many kinds of obstacle as the result of lawsuit between the peasant who supported and the land owner who refused Land Reform often caused conflicts. Out of the existence of pro and contra which implicated at the failure of Land Reform, the concept to reconstruct structure of land authority is one thing that we can learn. This thing is very important in order to avoid the polarization of land authority which tends to evoke agrarian conflict.

Keywords : The History of Agraria, Land Reform